

HASIL DISKUSI KELOMPOK II

KEL. 2: PEMANFAATAN & PELAPORAN DAK SUBBID YANFAR

1. Bagaimana pengalaman dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar selama ini? Apakah ada kendala?
2. Bagaimana koordinasi dengan lintas Dinas/satker/program dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar?
3. Apakah sudah cukup tersedia panduan dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar? Bila belum, panduan/pedoman apa yang diperlukan?
4. Bagaimana memanfaatkan laporan DAK untuk menilai kesesuaian penggunaan obat di FKTP pemerintah?
5. Solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan (mis.aplikasi pelaporan tersendiri)?

PERTANYAAN 1

- Bagaimana pengalaman dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar selama ini? Apakah ada kendala?
- Permasalahan :
 - E- Katalog belum maksimal sehingga realisasinya kecil
 - Daerah mempunyai Persepsi Dana DAK sebagai Sumber Utama menyebabkan DAU dikurangi,
 - Tidak semua kebutuhan daerah tercover dlm Menu DAK
 - beberapa Kabupaten tidak melibatkan Provinsi dlm Realokai DAK
- solusi
 - Perbaiki Sistem E Catalog
 - Advokasi kepada pengambil kebijakan disertai assestment yang kuat
 - Agar menambahkan Menu sesuai Kebutuhan Daerah / Juknis DAK
 - Merubah Juknis tentang Realokasi

PERTANYAAN 2

2. Bagaimana koordinasi dengan lintas Dinas/ satker /program dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar?

- Permasalahan :
- Koordinasi sudah dilaksanakan dengan maksimal dengan pihak terkait namun hasilnya belum optimal (salah satunya karena ada intervensi pemegang kebijakan)
- solusi
- Memantapkan peran dan fungsi TPOT (Tim Pengelola Obat Terpadu) dalam membuat perencanaan obat yang akurat dan analisa yang kuat sebagai bahan advokasi ke pimpinan

3. Apakah sudah cukup tersedia panduan dalam pemanfaatan DAK Subbid Yanfar? Bila belum, panduan/pedoman apa yang diperlukan?

- Belum cukup :
 - masih ada pedoman yang out of date/kadaluarsa spt pedoman standar penyimpanan di IFK, dan pedoman pengelolaan obat (1992)
 - Standar pedoman pemusnahan obat belum ada
 - Pedoman Khusus obat JKN juga mengatur berapa persen biaya obat dan biaya operasional untuk pengelolaan obat obat JKN yang diatur oleh permenkes.sehingga peran farmasi dirasakan dari kapitasi

Solusi :

- update pedoman yang sudah kadaluarsa
- Mempercepat terbitnya pedoman-pedoman yang masih dalam proses pembuatan/revisi terutama pedoman terkait JKN

PERTANYAAN -

4. Bagaimana memanfaatkan laporan DAK untuk menilai kesesuaian penggunaan obat di FKTP pemerintah?

- Laporan DAK saat ini hanya menginformasikan ttg realisasi keuangan dan fisik belum mencakup kesesuaian penggunaan obat.

-Memanfaatkan pelaporan LPLPO yang dilaporkan Pusk untuk dievaluasi kab/kota sehingga diketahui item obat mana yang paling sering di pakai, dan mengetahui kesesuaian penggunaan obat di fasyankes dasar dan pada akhirnya fornas yang sudah ada dievaluasi fornas bermanfaat atau tidak

- diharapkan adanya panduan evaluasi LPLPO untuk menilai menilai kesesuaian penggunaan obat di FKTP pemerintah?

Pertanyaan

5. Solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan (mis.aplikasi pelaporan tersendiri)?
 1. Perlu adanya aplikasi/software pelaporan dak khusus subbidang yanfar (offline)
 2. Adanya feedback laporan dak yang dikirim oleh prov dan kab/kota
 3. Adanya peningkatan kapasitas SDM yang membuat laporan (TOT pengelolaan obat)
 4. Insentif dan reward bagi daerah yang menyampaikan laporan dengan benar dan tepat waktu.

TERIMA KASIH